ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PERUBAHAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ELI ARYANTI

2416041114

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu isu sosial-ekonomi paling mendasar yang dihadapi Indonesia. Walaupun telah terjadi pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat jutaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada rendahnya pendapatan, tetapi juga memengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kualitas hidup secara umum. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan sosial yang signifikan, yang pada gilirannya menghambat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Salah satu program utama adalah Program Keluarga Harapan (PKH)**,** Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Program ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin secara berkelanjutan (Febby, Kushartono, & Fauzi, 2025; Putra & Pujianto, 2020). Meskipun PKH telah diterapkan di berbagai daerah, efektivitas program ini masih menghadapi tantangan yang bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Di Kota Bandar Lampung, meskipun merupakan kota metropolitan, masih terdapat keluarga miskin yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan formal yang stabil, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Pelaksanaan PKH di kota ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Febby, Kushartono, dan Fauzi (2025) menekankan bahwa keberhasilan implementasi PKH sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, pemahaman penerima manfaat terhadap mekanisme program, dan partisipasi aktif masyarakat. Namun, evaluasi pelaksanaan PKH di beberapa daerah menunjukkan adanya kendala dalam distribusi bantuan dan pemantauan penerima manfaat, yang dapat memengaruhi efektivitas program.

Selain itu, dalam konteks pemanfaatan fasilitas kesehatan, Putra dan Pujianto (2020) menemukan bahwa meskipun PKH mendorong peningkatan akses layanan kesehatan, masih terdapat kendala yang menghambat optimalisasi penggunaan fasilitas tersebut, khususnya layanan persalinan bagi keluarga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi sosial melalui PKH perlu didukung oleh sistem pemantauan yang efektif agar tujuan program dapat tercapai secara menyeluruh.

Walaupun wilayah Kota Bandar Lampung tidak se-terpencil seperti Kecamatan Alla di Kabupaten Enrekang, tantangan lain seperti pemahaman mekanisme program dan partisipasi aktif masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Sulfadli (2024) menunjukkan bahwa kurangnya pendampingan yang intensif dan kesenjangan pemahaman antara penerima manfaat dan pelaksana program dapat menghambat pencapaian tujuan PKH, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi jangka panjang dan mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat.

Dengan mempertimbangkan berbagai hasil evaluasi ini, jelas bahwa meskipun PKH memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga miskin, masih diperlukan kajian mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PKH secara lebih komprehensif di Kota Bandar Lampung, guna merumuskan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas program dalam jangka panjang (Febby, Kushartono, & Fauzi, 2025; Putra & Pujianto, 2020; Sulfadli, 2024).

Di Kota Bandar Lampung, PKH menjadi salah satu program strategis yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan. Program ini dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan didukung oleh pendamping PKH yang bertugas mengawasi, membimbing, dan mengevaluasi keluarga penerima manfaat. Pendamping bertugas memberikan edukasi, mendampingi keluarga dalam memenuhi kewajiban program, serta memastikan bantuan tunai digunakan untuk keperluan yang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Meskipun tujuan PKH jelas, penelitian dan laporan lapangan menunjukkan bahwa implementasi program menghadapi berbagai tantangan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia pendamping, pemahaman masyarakat terhadap hak dan

kewajibannya, hambatan administratif, serta dinamika sosial-ekonomi yang berbeda di tiap wilayah. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam teori implementasi kebijakan menekankan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa keluarga penerima manfaat memahami peran dan kewajibannya. Sumber daya yang memadai mendukung kelancaran program. Disposisi pelaksana, termasuk motivasi, sikap, dan kompetensi pendamping PKH, memengaruhi interaksi dengan penerima manfaat. Struktur birokrasi yang baik memungkinkan koordinasi dan pengawasan program berjalan lancar.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Sulastri (2021) menemukan bahwa keluarga yang secara rutin mendapatkan pendampingan dan bantuan PKH mengalami peningkatan partisipasi pendidikan anak dan akses kesehatan yang lebih baik. Rahayu (2022) menunjukkan bahwa pendampingan PKH juga berdampak pada pengelolaan keuangan keluarga, sehingga keluarga mampu meningkatkan pendapatan melalui usaha kecil dan tabungan rumah tangga. Namun, dampak tersebut tidak selalu merata karena dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan tingkat kepatuhan keluarga terhadap kewajiban program.

Fenomena kemiskinan di Kota Bandar Lampung menunjukkan kompleksitas yang unik. Kota ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, namun tetap terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural, termasuk keluarga yang tinggal di wilayah pinggiran kota, pemukiman kumuh, dan keluarga dengan akses terbatas ke layanan publik. Perbedaan latar belakang pendidikan, budaya kerja, dan dinamika sosial memengaruhi respons masyarakat terhadap PKH. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang seberapa besar PKH mampu mendorong perubahan kondisi sosial-ekonomi keluarga miskin secara nyata.

Selain itu, peran pendamping PKH sangat strategis dalam keberhasilan program. Pendamping tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membimbing keluarga dalam memenuhi kewajiban dan membantu mengatasi hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Kendala yang dihadapi pendamping, seperti jumlah keluarga yang dibina terlalu banyak, keterbatasan sumber daya, dan hambatan komunikasi dengan keluarga penerima manfaat, dapat memengaruhi efektivitas PKH di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengalaman pendamping dan keluarga penerima manfaat menjadi penting untuk

mengetahui faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi PKH.

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan praktik nyata masyarakat dan pendamping. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, penelitian ini dapat mendeskripsikan proses implementasi PKH secara komprehensif, termasuk hambatan, strategi, dan dampak yang dirasakan keluarga miskin di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada data statistik, tetapi juga pada pemahaman konteks sosial-ekonomi dan dinamika kehidupan masyarakat penerima program.

Selain manfaat akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan pendamping PKH. Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, strategi perbaikan dapat dirancang agar program lebih tepat sasaran, lebih efektif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi evaluasi kebijakan jangka panjang, sehingga program PKH dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian ini penting karena kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin tidak statis. Banyak keluarga yang mengalami ketidakpastian pekerjaan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta risiko sosial lainnya yang dapat memengaruhi hasil program PKH. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pengalaman penerima manfaat dan pendamping sangat penting untuk menilai keberhasilan dan tantangan program.

Dalam konteks teori kebijakan publik, PKH dapat dianalisis sebagai implementasi kebijakan sosial yang menekankan pada partisipasi masyarakat, interaksi antara aparat pemerintah dan penerima manfaat, serta efektivitas alokasi sumber daya. Hal ini relevan dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi tergantung pada kemampuan pelaksana, kualitas komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat menangkap nuansa-nuansa yang tidak terlihat dalam data kuantitatif, seperti persepsi subjektif

penerima manfaat, motivasi pendamping, dan interaksi sosial yang memengaruhi keberhasilan program.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi PKH di Kota Bandar Lampung dan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga miskin. Penelitian ini akan menyoroti faktor-faktor yang mendukung atau menghambat program, pengalaman penerima manfaat, dan strategi yang dilakukan pendamping untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori implementasi kebijakan sosial dan perbaikan praktik program PKH di tingkat lokal. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan program PKH sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi penerima manfaat. Misalnya, tingkat pendidikan orang tua, struktur keluarga, dan jenis pekerjaan yang dijalani memengaruhi kemampuan keluarga dalam memanfaatkan bantuan PKH secara optimal. Menurut Sulastri (2021), keluarga dengan tingkat pendidikan rendah cenderung membutuhkan pendampingan lebih intensif agar dapat memahami prosedur program dan memanfaatkan bantuan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PKH tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat setempat.

Di Kota Bandar Lampung, distribusi penduduk miskin tidak merata. Beberapa wilayah perkotaan memiliki konsentrasi keluarga miskin yang tinggi, khususnya di permukiman padat dan pinggiran kota. Faktor-faktor geografis, ketersediaan fasilitas publik, dan akses transportasi memengaruhi kemampuan keluarga miskin untuk mengikuti kewajiban program, seperti membawa anak ke fasilitas kesehatan atau sekolah. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas PKH tidak hanya bergantung pada desain program, tetapi juga pada kondisi lokal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Pendamping PKH berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan keluarga penerima manfaat. Keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas interaksi antara pendamping dan keluarga, termasuk kemampuan pendamping untuk menjelaskan prosedur, memberikan motivasi, serta membantu keluarga mengatasi kendala praktis. Beberapa studi menunjukkan bahwa motivasi dan kompetensi pendamping berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan keluarga penerima manfaat terhadap kewajiban program (Rahayu, 2022). Dengan kata lain, program PKH bukan hanya soal memberikan bantuan finansial,

tetapi juga bagaimana proses pendampingan dilakukan sehingga menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan keluarga miskin.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin di Bandar Lampung juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi, ketersediaan lapangan kerja, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Banyak keluarga miskin menghadapi ketidakpastian pekerjaan, pendapatan yang tidak stabil, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini membuat implementasi PKH menjadi lebih kompleks karena bantuan tunai bersyarat harus disesuaikan dengan kapasitas keluarga untuk memenuhi kewajiban program. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman keluarga secara mendalam, termasuk strategi yang mereka gunakan untuk menghadapi kendala sosial-ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari.

Selain itu, interaksi antara penerima manfaat dan pendamping PKH juga membentuk dinamika sosial yang menarik untuk dianalisis. Misalnya, bagaimana pendamping menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan karakteristik keluarga, dan bagaimana keluarga menanggapi pendampingan tersebut. Fenomena ini menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dalam penelitian kualitatif, karena faktor-faktor subjektif seperti motivasi, persepsi, dan pengalaman nyata sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Kajian literatur internasional juga mendukung pentingnya analisis kualitatif dalam menilai program bantuan sosial. Menurut Sabates-Wheeler dan Devereux (2010), keberhasilan program perlindungan sosial tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat, termasuk perubahan perilaku, akses terhadap layanan publik, dan peningkatan kualitas hidup. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap nuansa-nuansa ini melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi.

Lebih lanjut, penelitian ini berfokus pada aspek perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin sebagai akibat dari implementasi PKH. Kondisi sosial-ekonomi mencakup dimensi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dari sisi ekonomi, penelitian akan menggali bagaimana bantuan PKH memengaruhi pengelolaan keuangan keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan potensi peningkatan pendapatan melalui usaha mikro. Dari sisi pendidikan, fokus penelitian adalah partisipasi anak dalam sekolah,

keberlanjutan pendidikan, dan dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sedangkan dari sisi kesehatan, penelitian akan menilai akses keluarga terhadap layanan kesehatan, tingkat pemeriksaan kesehatan rutin, dan kondisi gizi anak. Analisis kualitatif terhadap PKH di Kota Bandar Lampung juga memperhatikan faktor-faktor penghambat implementasi. Hambatan tersebut dapat berasal dari:Faktor internal pemerintah daerah, seperti keterbatasan tenaga pendamping, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, dan prosedur administrasi yang rumit. Faktor internal keluarga penerima, seperti rendahnya pendidikan orang tua, ketidakpahaman terhadap kewajiban program, dan keterbatasan sumber daya keluarga untuk memenuhi syarat program. Faktor eksternal, termasuk kondisi ekonomi makro, akses terhadap layanan publik, dan faktor sosial budaya yang memengaruhi partisipasi keluarga.

Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi PKH dan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin di Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam terhadap proses, tantangan, dan strategi yang diterapkan oleh pendamping dan keluarga penerima manfaat, sehingga temuan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi pengambilan keputusan kebijakan sosial.

Penelitian ini juga relevan untuk pengembangan teori implementasi kebijakan sosial di Indonesia. Dengan menggunakan perspektif kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi mekanisme, interaksi, dan faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan program, yang sering tidak terlihat dalam pendekatan kuantitatif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang strategi perbaikan program PKH, sehingga manfaatnya dapat lebih optimal bagi masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif**,** karena fokus utamanya adalah menggali pengalaman, persepsi, dan interaksi antara pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat di Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap nuansa sosial-ekonomi yang tidak bisa diukur dengan angka saja, seperti motivasi keluarga mengikuti program, strategi mereka memanfaatkan bantuan, serta kendala yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Sulastri, 2021).

Dalam konteks PKH, keluarga penerima manfaat tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan bantuan finansial, tetapi juga dari perubahan perilaku, keputusan ekonomi, dan

akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan**.** Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami proses transformasi sosial-ekonomi ini secara holistik, misalnya melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif yang mengungkap bagaimana keluarga miskin menyesuaikan diri dengan kewajiban program dan bagaimana pendamping memberikan dukungan (Rahayu, 2022).

Selain itu, penelitian kualitatif penting untuk mengeksplorasi faktor kontekstual yang memengaruhi implementasi PKH, seperti budaya lokal, norma sosial, dan struktur keluarga (Anggraini, 2024). Faktor-faktor ini sering tidak terlihat dalam penelitian kuantitatif, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan program. Misalnya, persepsi berbeda antara pendamping dan keluarga penerima manfaat mengenai tujuan program dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dan efektivitas intervensi PKH.

Pendekatan kualitatif juga memungkinkan penelitian ini untuk mengeksplorasi hambatan internal dan eksternal**.** Hambatan internal bisa berupa keterbatasan sumber daya keluarga atau rendahnya pemahaman tentang prosedur PKH, sedangkan hambatan eksternal meliputi akses transportasi, fasilitas kesehatan, dan kondisi ekonomi makro (Van Meter & Van Horn, 1975; Sabates-Wheeler & Devereux, 2010). Dengan demikian, penelitian tidak hanya menilai output PKH, tetapi juga proses, interaksi sosial, dan pengalaman subjektif yang membentuk dampak nyata program terhadap kesejahteraan keluarga miskin.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial-ekonomi masyarakat miskin, menilai efektivitas kebijakan sosial dari perspektif penerima manfaat, serta memberikan rekomendasi berbasis pengalaman lapangan. Temuan penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih responsif dan berorientasi pada konteks lokal di Kota Bandar Lampung (Sulfadli, 2023; Azzahra, 2024).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung dari perspektif pendamping dan keluarga penerima manfaat?
2. Bagaimana pengalaman, persepsi, dan tanggapan keluarga miskin terhadap bantuan dan pendampingan PKH?

3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH, baik dari sisi pendamping maupun keluarga penerima manfaat?
4. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan implementasi PKH dalam meningkatkan kondisi sosial-ekonomi keluarga miskin di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung, termasuk mekanisme pendampingan dan distribusi bantuan.
2. Menggali pengalaman, persepsi, dan tanggapan keluarga miskin terhadap bantuan PKH dan pendampingan yang diberikan.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi pendamping dan keluarga penerima manfaat dalam pelaksanaan PKH.
4. Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan implementasi PKH dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi keluarga miskin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan sosial, khususnya terkait implementasi program bantuan sosial. Hasil penelitian dapat memperkaya pemahaman mengenai mekanisme, tantangan, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya dalam memahami pengalaman, persepsi, dan praktik nyata penerima manfaat, sehingga teori implementasi kebijakan sosial dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah, pendamping PKH, dan keluarga penerima manfaat. Bagi pemerintah daerah, temuan penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH, merancang

strategi pendampingan yang lebih tepat sasaran, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial-ekonomi lokal. Sedangkan bagi pendamping PKH, penelitian ini memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dalam mendampingi keluarga miskin, termasuk cara mengatasi kendala yang muncul di lapangan agar program dapat berjalan lebih optimal.

Bagi keluarga penerima manfaat, penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban dalam program PKH. Dengan pemahaman yang lebih baik, keluarga dapat memanfaatkan bantuan sosial secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Secara keseluruhan, manfaat praktis penelitian ini diharapkan mendukung tercapainya tujuan PKH dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, N. (2024). *Analisis implementasi Program Keluarga Harapan: Perspektif keluarga penerima manfaat*. Jakarta: Penerbit Akademika.

Azzahra, F. (2024). *Tantangan aksesibilitas dan implementasi PKH di wilayah terpencil Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kemiskinan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.

Febby, N. A., Kushartono, T., & Fauzi, L. M. (2025). Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 2*(1). https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/praxis/article/view/3142

Putra, G. W., & Pujianto. (2020). Evaluasi dampak Program Keluarga Harapan terhadap pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan untuk layanan persalinan di Indonesia (Analisis data SUSENAS tahun 2018). *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, 5*(1). https://scholarhub.ui.ac.id/eki/vol5/iss1/7

Rahayu, S. (2022). *Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Sosial.

Sabates-Wheeler, R., & Devereux, S. (2010). *Cash transfers and social protection: Understanding the impact on poor households*. London, UK: Institute of Development Studies.

Sulfadli, M. (2023). *Evaluasi program PKH di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.

Sulfadli, M. (2024). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6*(2). https://ejournal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/974

Sulastri, D. (2021). *Peran pendamping PKH dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi keluarga miskin*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. Berkeley, CA: University of California Press.